

Judul : Berpaling pada produk lokal
Tanggal : Rabu, 09 September 2020
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 4

BERPALING PADA PRODUK LOKAL

DALAM TIM PENGEMBANGAN VAKSIN, KEMENTERIAN BIDANG EKONOMI LEBIH BERPERAN PADA URUSAN ANGGARAN DAN PRODUKSI.



Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kdua dari kiri), didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kdua kanan), dan Menteri EUMN Erick Thohir (kanan) setelah rapat koordinasi Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kemenko Perekonomian, Jakarta, 4 September lalu.

Yohanes Paskalis

yohanes.paskalis@tempo.co.id

JAKARTA – Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo akan menangani pengembangan Vaksin Merah Putih sebagai produk dalam negeri.

Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, yang ditunjuk sebagai Ketua Tim, mengatakan tengah menyiapkan keputusan menteri untuk membagi peran pokok setiap anggota. "Aturan teknisnya segera disiapkan," kata dia di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, kemarin.

Bambang mengatakan tim ini dibentuk untuk memfasilitasi pengembangan vaksin lokal yang diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap vaksin dari negara lain. Mereka juga akan memastikan kebutuhan vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat, termasuk jika harus diberikan lebih dari satu kali.

Menurut dia, kebutuhan tak akan tercukupi jika pemerintah hanya mengandalkan vaksin hasil kolaborasi dengan pihak asing. "Negara-negara lain juga berebut suplai dan harga akan naik karena banyak permintaan."

Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 3 September lalu. Dalam Pasal 4, dinyatakan bahwa tugas tim ini mencakup penelitian, inovasi, produksi, distribusi, transfer teknologi, hingga pemanfaatannya untuk masyarakat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto tercantum sebagai Ketua Dewan Pengarah, didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Adapun Menteri Riset dan Teknologi sebagai Ketua Penanggung Jawab memiliki dua wakil, yaitu Menteri Kesehatan Terawan Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Sementara itu, persoalan teknis dijalankan berbagai lembaga yang masuk dalam tim pelaksana harian, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), kampus, dan badan usaha. Tim ini bertugas hingga 31 Desember 2021.

Menurut Bambang, kementerian bidang ekonomi dalam tim ini bertugas mengkoordinasikan hal-hal tertentu. Contohnya, Kementerian Koordinator Perekonomian bertanggung jawab dalam hal anggaran, sementara Kementerian BUMN untuk produksi dan distribusi vaksin. Tim ini juga akan mengelola pengembangan vaksin di beberapa laboratorium pemerintah.

Bambang mengatakan anggaran tim ini akan dibiayai oleh lembaganya hingga akhir tahun ini. Dana tambahan, menurut dia, baru dibutuhkan saat uji klinis besar-besaran berjalan pada 2021.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan struktur tim vaksin tak jauh berbeda dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sehingga tak sulit untuk berbagi tugas. "Koordinasinya bisa langsung," ujar dia.

Kepala BPPT Hamam Riza mengatakan lembaga akan menangani rancangan manufaktur vaksin. Dia mengklaim BPPT berpengalaman menangani pengembangan berbagai jenis vaksin, dari Hepatitis B, vaksin dengue, dan *human papilloma*. "Kami juga ikut dalam transfer teknologi," kata dia.

Wakil Ketua Komisi Riset dan Teknologi DPR Alex Noerdin menganggap wajar pembentukan lembaga baru untuk menangani pengembangan vaksin yang rumit. Adapun anggota Komisi Riset dan Teknologi DPR, Eddy Soeparno, menyebutkan tim ini memiliki fokus kerja tersendiri. "Asal jangan ada tumpang-tindih kewenangan dengan tim dan komite lainnya," ujar dia. "Kalau kontraproduktif, harus dievaluasi."

● EGI ADYATAMA | IKIRI ARIGI

KORAN TEMPO INI DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG, DILARANG MEMPERBANYAK, MENGANDAK